

MEMAKNAI PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI PROSES HUMANISASI

Syukri Fathudin AW dan Wagiran
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, FT UNY

ABSTRAKSI

Pendidikan adalah proses humanisasi. Namun demikian dalam prakteknya belumlah sesuai dengan rumusan tersebut. Dalam lingkup pendidikan tinggi misalnya dewasa ini menghadapi sorotan tajam menyangkut kualitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri maupun kualitas lulusan yang dihasilkannya baik dari segi intelektualitas maupun moralitas. Menghadapi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah konsisten dalam upaya perbaikan sistematis menuju pendidikan yang bersifat holistic, integrative dan sistemik dengan mengembalikan pendidikan pada visi dan tujuan semula sebagai proses humanisasi.

Kata Kunci: pendidikan, humanisasi, moralitas.

PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi menghadapi permasalahan yang cukup rumit. Sorotan tajam dari masyarakat ditujukan kepada perguruan tinggi menyangkut kualitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri maupun kualitas lulusan yang dihasilkannya. Tingginya angka pengangguran intelektual, kurangnya kemandirian lulusan, mahalnya biaya pendidikan, dan yang terakhir adalah terjadinya praktek-praktek kekerasan dalam lingkungan kampus maupun terjadinya kasus-kasus yang jauh dari nilai-nilai moral menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Menjadi sebuah pertanyaan apa fungsi pendidikan selama ini. Apa sebenarnya yang salah dalam pendidikan kita, orientasinya ataukah implementasinya di lapangan. Apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Inilah yang harus selalu dipikirkan oleh kalangan pendidikan dan masyarakat.

PEMBAHASAN

Tantangan Pendidikan Tinggi Masa Depan

Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2003 melaporkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 40 juta orang, suatu angka yang paling menyimpang kekhawatiran di kawasan ASEAN. Dari 40 juta orang tersebut 1 juta diantaranya adalah sarjana dari berbagai program studi yang belum mendapatkan pekerjaan. Data dari Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2001 menunjukkan bahwa sekitar 12,5 % lulusan perguruan tinggi masih menganggur. Angka tersebut diyakini meningkat saat ini mengingat kondisi perekonomian yang belum mapan ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan. Pergeseran orientasi pendidikan ke pasar dunia kerja disinyalir merupakan penyebabnya. Orientasi pasar kerja yang dimaksud adalah lembaga pendidikan selama ini umumnya lebih dominan mengukur keberhasilannya dari jumlah lulusan yang diterima bekerja dan belum menyentuh bagaimana menciptakan pekerjaan. Akibatnya sistem pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dalam kurikulum lebih diarahkan bagaimana menghasilkan lulusan untuk mengisi lapangan kerja di industri atau perusahaan. Mekanisme industri menjadi tolok ukur utama dunia pendidikan yang menyebabkan

matakuliah yang sifatnya tidak teknis atau yang berbicara tentang nilai dianggap tidak relevan. Menjadi masalah tatkala terjadi perubahan yang begitu cepat dalam struktur dunia kerja. Krisis yang terjadi mengakibatkan ambruknya industri-industri maupun perusahaan yang diprediksikan bakal menerima mereka nantinya. Di sisi lain industri yang dibangun dengan semangat kemandirian dan kewirausahaan ternyata mampu bertahan dan menopang ekonomi negara secara signifikan. Tenaga kerja maupun lulusan pendidikan yang hanya berorientasi kerja menghadapi masalah yang amat serius dalam kondisi ini.

Permasalahan tersebut di atas diperparah dengan rendahnya kesiapan dalam menghadapi persaingan di era global. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta era globalisasi yang dimulai dengan ditetapkannya kawasan perdagangan bebas tingkat Asean atau AFTA (*Asean Free Trade Area*) pada tahun 2003 akan memberi dampak pula pada bidang pendidikan. Untuk dapat berkiprah dalam era global tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai daya saing secara terbuka dengan negara lain, adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan dan kondisi baru, terbuka terhadap perubahan, mampu belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*), multi-*skilling*, mudah dilatih ulang, memiliki dasar-dasar kemampuan luas, kuat dan mendasar dan kemampuan untuk berkembang di masa yang akan datang.

Perubahan yang begitu cepat dalam berbagai aspek kehidupan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan seseorang yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bekerja saja namun juga memiliki daya suai terhadap berbagai perubahan, kemandirian dan kemampuan untuk berkembang. Pendidikan sebagai pranata utama penyiapan SDM sudah seharusnya diorientasikan sesuai dengan kondisi dan tuntutan tersebut agar dapat mengikuti perkembangan yang terjadi.

Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas SDM

Menghadapi permasalahan dan tantangan pendidikan dalam era global perlu dilakukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang dipandang berbagai pihak tidak efektif dan tidak mampu lagi memberikan bekal serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan negara-negara lain. Perubahan tersebut menuju suatu sistem pendidikan yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, kompetensi dan kemampuan mengembangkan diri sesuai dengan lingkungan dan tuntutan hidupnya. Cukup lama pendidikan terutama pendidikan di Indonesia terlalu menekankan segi kognitif, sedangkan segi spiritual, emosional, sosial, fisik, seni kurang mendapatkan tekanan. Akibatnya anak didik kurang berkembang secara menyeluruh. Dalam pembelajaran yang ditekankan hanya *to know* (untuk tahu) sedangkan unsure pendidikan yang lain seperti *to do* (melakukan), *to live together* (hidup bersama), *to be* (menjadi) kurang menonjol (Suparno, 2004). Pendidikan sudah saatnya diletakkan pada empat pilar belajar yaitu: belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*) dan belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*). Selain itu perlu dikembangkan kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan kehidupan.

Dari gambaran kondisi masa depan tersebut makin menguatkan bahwa peserta didik harus dibekali dengan kemandirian menghadapi lingkungan yang mudah berubah. Kalau peserta didik hanya dibekali dengan bekal ketrampilan kerja maka ia akan kecewa manakala struktur pekerjaan telah berubah dengan cepat dan apa yang ia dapatkan di bangku kuliah ternyata telah usang. Akan lebih baik kalau ia dibekali dengan kemampuan memahami

perubahan itu sendiri untuk dapat menyesuaikan diri dan bahkan menciptakan lapangan kerja. Selain indeks prestasi dan masa studi, sudah saatnya bila keberhasilan pendidikan bukan hanya dinilai dari diterimanya lulusan bekerja di industri atau perusahaan. Saatnya kampus mendorong dan memberi apresiasi terhadap lulusan yang menciptakan pekerjaan sendiri. Saatnya bila kewirausahaan dengan segala nilai-nilainya dijadikan muatan penting dalam orientasi pendidikan (dalam hal ini kurikulum). Tidak perlu menambah jam matakuliah kewirausahaan atau bahkan tidak perlu mengadakan matakuliah kewirausahaan, namun yang terpenting adalah bagaimana menanamkan jiwa wirausaha melalui penyadaran dan internalisasi.

Pendidikan tinggi juga disorot banyak kalangan berkait dengan industrialisasi dan komersialisasi yang berlaku di dalamnya. Apakah itu perguruan tinggi negeri atau swasta, dua-duanya sedang melakukan hal yang sama yaitu mempercepat proses industrialisasi pendidikan yang intinya bagaimana pendidikan tinggi bisa menjadikan kegiatan akademik dapat menghasilkan produk pendidikan yang berbobot tetapi juga menghasilkan kesejahteraan yang mamadai. Idealisasi yang ingin dicapai disatu pihak sebagai sebuah institusi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik dilain pihak sebagai diharapkan dapat mendatangkan profit untuk kesejahteraan sivitas akademiknya. Namun banyak terjadi kepincangan dan bahkan cenderung berat sebelah. Komersialisasi pendidikan tinggi dalam hal ini ternyata lebih mengemuka. Heru Nugroho (2002) yang diilhami istilahnya George Ritzer (1996), menyatakan bahwa telah terjadi McDonaldisasi Pendidikan yang bercirikan: (1) *kuantifikasi*; yakni ketika cara evaluasi hasil produk pendidikan tinggi hanya dilihat dari kuantitasnya saja, (2) *efisiensi*, yaitu program studi yang dinilai menghasilkan uang semakin didorong dan difasilitasi sedang yang kurang menghasilkan terancam ditutup, (3) *prinsip keterprediksian*, artinya kurikulum didesain harus mampu mengantisipasi kebutuhan pasar kerja tanpa melihat dimensi lainnya, (4) *prinsip teknologisasi*, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus selalu menggunakan teknologi modern dan bahkan *hi-tech*. Namun saat yang sama lembaga pendidikan tak mampu mengontrol penerapan teknologi dalam masyarakat.

Komersialisasi pendidikan dalam analisa Muchtar Buchori (Folder Buku, 2003) mengacu pada dua keadaan yaitu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapannya serba mahal sehingga hanya terjangkau kalangan yang kaya saja. Dalam artian pendidikan yang “bermutu” bukan untuk orang miskin. Model kedua mengacu pada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang sumbangan saja tetapi mengabaikan kewajiban mereka untuk memberi pelayanan pendidikan yang sesuai untuk peserta didik. Model inilah yang telah membunuh idealisme pendidikan. Pada model pertama walaupun berbiaya tinggi kualitas masih kita dapatkan, namun pada model kedua kualitas menjadi hal yang dilupakan.

Akibat yang timbul dari komersialisasi pendidikan yang hanya menenkankan biaya mahal menimbulkan harapan yang berbeda dari orangtua maupun mahasiswa. Orangtua tidak lagi membayangkan kelak di kemudian hari anaknya akan menjadi sosok yang berguna di masyarakat karena keluhuran budinya serta keihlasan pengabdianya. Mereka hanya berharap segera setelah anaknya lulus segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan jabatan penting dengan gaji yang besar untuk menebus biaya yang telah dikeluarkannya. Bagi peserta didik mereka akan berpikir pragmatis: cepat lulus, dan segera bekerja, selesai. Mereka tidak sempat berpikir tentang cita-cita besar menjadi sosok manusia berilmupengetahuan luas yang memiliki pengetahuan luas, berkepribadian tangguh dan mulia. Pendidikan telah menjauhkan peserta didik dari tanggungjawab sosialnya.

Pendidikan akhirnya hanya dipahami dan bernmanfaat ketika hanya sekedar mampu menyediakan tenaga kerja bagi para penanam modal.

Banyak pula keluhan dilontarkan masyarakat mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam aspek logika, estetika, etika dan kinestetika. Pendidikan belum berhasil mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkehidupan sosial yang harmonis kemampuan menghargai, merespon dan dan memproduksi karya seni budaya serta kemampuan berolahraga. Pengalaman yang diperoleh di lembaga pendidikan terlalu berat ke pengembangan kemampuan intelektual dan kurang menyentuh kemampuan yang lain.

Pada sisi lain terjadinya praktek-praktek kekerasan di perguruan tinggi dan tingginya kasus Narkoba dan kasus lain yang jauh dari nilai etika dan moral di kalangan mahasiswa, semakin menambah catatan suram dunia pendidikan kita. Fenomena ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Sudarwan Danim (2003) yang menyatakan:

“Dengan tetap menghargai hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai krisis proses kemanusiaan dan pemanusiaan di negara kita secara kekinian benar-benar sah jika disorot secara tajam. Pendidikan sebagai instrumen utama proses kemanusiaan dan pemanusiaan disorot tajam oleh masyarakat dan pemakai lulusan. Arogansi kekuasaan, krisis ekonomi, pelanggaran ketertiban umum, aksi memfitnah, main hakim sendiri, kerusuhan perampokan, pecandu narkoba dan obat-obat terlarang, politisasi massa, kekerasan, korupsi, kolusi nepotisme, dan perilaku buruk lainnya masih menggejala. Perilaku disekitar kita sepertinya makin nyata telah kehilangan nuansa kemanusiaan dan pemanusiaan sejati. Akhirnya kita masih pantas menyatakan bahwa kita belum menjadi manusia dalam artian sesungguhnya”

Perkembangan kehidupan di Indonesia ditandai dengan berbagai ketimpangan seperti moral, akhlak, jati diri bangsa, sosial politik dan ekonomi (Nurhadi, 2004). Pendidikan ternyata tidak mampu menanamkan jiwa demokratis maupun mewujudkan karakter bangsa. Pendidikan yang seharusnya merupakan pembentukan karakter peserta didik (*character building*) telah banyak dilupakan oleh penyelenggara pendidikan kita yang lebih menonjolkan orientasi profit daripada aspek pengabdian dan pelayanan. Pendidikan yang hanya mengejar profit cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya pembunuhan karakter (*character killing*) peserta didik. Peserta didik akan kehilangan visi moral kemanusiaannya karena penyelenggaraan pendidikan yang tidak lagi memperhatikan aspek pengabdian dan pelayanan. Bangsa Indonesia sepertinya telah kehilangan karakter yang telah dibangun bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Keramahan, tenggangrasa, kesantunan, kesopanan, rasa saling menghormati dan menghargai, seolah-olah hilang ditelan bumi. Di mana fungsi pendidikan ?

Pendidikan Sebagai Proses Humanisasi

Menghadapi berbagai permasalahan pendidikan ke depan dalam hemat kami perlu dilakukan upaya perbaikan sistematis menuju pendidikan yang bersifat *holistic, integrative* dan *sistemik* dengan mengembalikan pendidikan pada visi dan tujuan semula. Dalam hal ini perlu diungkap kembali makna sebenarnya pendidikan tersebut. Pendidikan mempunyai visi awal yaitu meninggikan martabat manusia, menciptakan pribadi-pribadi yang luhur serta mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan sosial di sekitarnya. Pendidikan merupakan cara mensosialisasikan kepada generasi baru isi kebijaksanaan, ketrampilan, dan cara bertindak yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup

komunitas politik, ekonomi dan cultural tertentu. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang demokratis serta bertanggungjawab. Prof. Driyarkara (1980 dalam Sudiarja, 2004), dalam makalahnya tentang pendidikan merumuskan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda. Suatu pengangkatan manusia muda ke taraf insani sehingga dia dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia utuh dan membudayakan diri.

Dari rumusan visi dan tujuan pendidikan tersebut jelas bahwa pendidikan adalah proses *hominisasi* dan *humanisasi* yaitu proses memanusiakan manusia muda menjadi pribadi yang utuh. Manusia yang utuh atau sempurna adalah apabila dapat mengembangkan unsur rasionalitas, kesadaran, akal budinya (pengetahuan), mengembangkan segi spiritualitas, moralitas, sosialitas, keselarasan dengan alam, serta rasa dan emosinya (Suparno, dkk., 2002). Namun demikian terlihat ketidakkonsistenan pelaksana pendidikan dalam pelaksanaannya. Artinya rumusan yang sempurna tersebut belum dijabarkan secara komprehensif.

Bila manusia yang kita inginkan adalah manusia yang utuh dalam semua segi kemanusiaannya maka jelas bahwa pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik/manusia muda menjadi manusia haruslah menyangkut semua unsur kehidupan manusia seperti spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, rasionalitas. Oleh karena itu pendidikan bukan hanya menekankan segi pengetahuan saja namun harus memperhatikan sisi yang lain secara integratif. Pada tataran praktis dari sisi pelaksanaan kurikulum, mengutip pendapat Taba, H. dalam Saylor, J.G., dkk (1981) sedikitnya terdapat tiga pilar pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum yaitu: kebutuhan masyarakat (orang tua, *stakeholder*, dunia usaha/industri), karakteristik pebelajar dan lingkup pengetahuan dalam sistem keilmuan. Dalam aplikasinya tanpa disadari pertimbangan tertentu dimenangkan sedangkan pertimbangan yang lain dikalahkan. Kadangkala pertimbangan ini terkesan logis dan rasional namun setelah diterapkan ternyata timbul permasalahan karena mengabaikan perspektif yang lain. Oleh karena itu dalam pengembangan dan penerapan kurikulum perlu dijaga keseimbangan antara ketiga kepentingan tersebut.

Dari berbagai tesa di atas format pendidikan yang layak adalah pendidikan *holistic integrative* dengan mengembangkan peserta didik secara utuh dari aspek inteligensi, emosional maupun spiritualnya secara terintegrasi dan bukan parsial. Selain itu peserta didik harus dibekali dengan kemandirian serta kewirausahaan selain kemampuan untuk bekerja secara professional di bidangnya untuk dapat berkembang dan beradaptasi dengan masyarakat dalam kehidupannya.

Para pendidik harus selalu ingat, bahwa peserta didik (mahasiswa) adalah manusia utuh dan tujuan pendidikan adalah menjadikan sebagai manusia utuh, oleh karena itu harus didik pula secara utuh. Kecerdasan yang dikembangkanpun bukan melulu kecerdasan intelektual, melainkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual mereka. Kecerdasan dalam konteks ini hendaknya dipahami sebagai kecerdasan multidimensional. Menjadi

suatu tantangan bagi pendidik untuk mengintegrasikan seluruh komponen tersebut dalam pembelajaran

Seiring dengan semangat reformasi, otonomi dan desentralisasi, pemberian otonomi kepada perguruan tinggi dalam berbagai hal termasuk implementasi kurikulum merupakan momentum yang tepat dalam upaya mendidik generasi muda menjadi manusia seutuhnya dari berbagai dimensi baik inteligensi, emosional, empati maupun moralitas dan integritas untuk kembali hidup di masyarakat secara berdaya dan berguna. Harapannya pendidikan yang diselenggarakan mampu mengintegrasikan ketiga kepentingan (masyarakat, pembelajar dan struktur keilmuan) sesuai dengan karakteristik lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Dengan demikian pendidikan mampu menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sistem kehidupan di masyarakat.

Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang dalam proses pembelajaran dan pelatihan berpusatkan pada peserta didik (Theo Riyanto, 2002). Peserta didik tidak sekedar obyek pendidikan tetapi subyek pendidikan. metode yang cukup tepat misalnya adalah metode-metode yang menunjukkan keaktifan peserta didik baik dalam cara berpikir, berekspressi, bekerja, seperti model learning by doing dan metode-metode yang meemntingkan pengalaman seperti refleksi, diskusi kelompok, pemecahan masalah, eksperimentasi, dan kerajinan tangan. Metode-metode ini cukup efektif untuk mengembnagkan kecerdasan pikir, kecerdasan emosi, kecerdasan budi, dan ketrampilan. Akhirnya perlu disadari bahwa tujuan pendidikan secara menyeluruh dan mendasar adalah memanusiaikan manusia muda. Pendidikan mesti menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya, yang bertanggungjawab, proaktif, dan kopperatif. Masyarakat membutuhkan pribadi-pribadi yang handal dalam bidang akademis dan ketrampilan sekaligus memiliki pribadin yang berwatak dan berbudi pekerti luhur.

Peserta didik adalah pribadi manusia. Pendidik harus memahami mereka sebagai pribadi manusia juga. Pendidik mengakui dan menghargai hal-hal yang berkaitan erat dengan diri mereka seperti keadaan fisiknya, kemauannya untuk tidak tergantung, nilai-nilainya, hubungan atar lawan jenis, relasi sosialnya, identitas pribadinya, dan kompetensi-kompetensinya. Peserta didik dibimbing supaya menjadi lebih merdeka, bertanggungjawab, percaya diri dan lebih mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Pembelajaran dewasa ini yang menganggap peserta didik sebagai botol kosong atau tabularasa dan tugas pengajar adalah mengisi atau menulisinya sudah mulai ditinggalkan menuju ke arah pembelajaran konstruktivistik. Menurut filsafat ini pengetahuan adalah bentukan(konstruksi) mahasiswa sendiri yang sedang belajar. Pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari dosen ke mahasiswa melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya. Fungsi guru/dosen adalah sebagai mediator dan fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar yang merangssang keingintahuan mahasiswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasan dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka. Dosen bertugas memonitor dan mengevaluasi apakah pemahaman mahasiswa berjalan atau tidak untuk menghadapi persoalan baru yang berjalan.

Model pembelajaran yang dianggap baik adalah model demokratis dan dialogis. Mahasiswa dapat mengungkapkan gagasannya, dapat mengkritik pendapat dosen, dapat mengungkapkan jalan pikirannya yang lain dari dosen, Dosen tidak menjadi diktator yang

hanya menekankan satu jawaban benar, tetapi lebih demokratis. Pendidikan yang benar harus membebaskan mahasiswa untuk berpikir, berkreasi, dan berkembang. Mahasiswa tidak dijadikan penurut seperti robot, tetapi menjadi pribadi yang dapat berpikir, memilih dan menentukan.

Dalam pembelajaran saat ini yang mengacu pada KBK maka kompetensi hendaknya tidak hanya dibatasi pada segi pengetahuan (mengetahui fakta) tetapi sampai dengan kompetensi untuk melakukan (*to do*), hidup bersama (*to live together*), dan menjadi dirinya (*to be*) (Suparno, 2003). Lebih lanjut agar kompetensi sungguh terwujud maka : (1) siswa sungguh diaktifkan dan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Siswa dibantu untuk menemukan sendiri nilai yang mau ditekankan, bukan dicekoki oleh guru. Model pembelajarannya konstruktivis yaitu siswa hanya akan menguasai pengetahuan dan juga mengerti bila ia sendiri melatihnya dan aktif menggulati. Dalam bidang nilai agama siswa hanya akan sungguh mempunyai kompetensi bila siswa sendiri menggeluti, melatih dan mempraktekannya, (2) siswa lebih banyak dilatih untuk mencari dan menemukan sendiri nilai yang akan dikuasai. Tentu guru sudah tahu nilai apa yang mau ditekankan dan dibantukan kepada siswa, tetapi model pembelajarannya akan siswa menemukan sendiri. Dengan demikian siswa lebih menangkap, menguasai, dan nilai itu dapat menjadi miliknya sendiri yang akan dilakukan dalam hidupnya, (3) tekanan bukan pada hafalan tetapi pada nilai yang dipunyai dan dikembangkan dalam hidupnya, (4) guru sungguh sebagai fasilitator agar siswa sendiri menekuni dan melatih. Maka modelnya bukan guru aktif namun siswa aktif, (4) hubungan guru dan siswa lebih dialogal, mencari bersama, saling membantu, dan (5) evaluasinya lebih menyeluruh, bukan hasil ujian akhir tetapi seluruh proses, dengan portofolio, presentasi, *performance* dan sebagainya.

PENUTUP

Akhirnya perlu disadari dan ditegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan proses humanisasi dalam artian memanusiakan manusia muda menjadi manusia seutuhnya yang bermartabat. Oleh karena itu diperlukan pendidikan secara utuh dan terintegrasi dari dimensi-dimensi kemanusiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Nugroho, 2002, *McDonaldisasi pendidikan tinggi*, Yogyakarta
- Nurhadi, 2004, *Kurikulum 2004, Pertanyaan dan jawaban*, Jakarta, Grasindo
- Sudarwan Danim, 2003, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sudiarja, 2003, Pendidikan agama dalam zaman yang berubah, *Majalah Basis Nomor 07-08, Tahun ke-52, Juli-Agustus 2003 Pendidikan.*, hal. 9 – 16
- Suparno dkk., 2002, *Reformasi Sebuah Rekomendasi*, Yogyakarta, Kanisius
- Suparno, 2003, Pendidikan Agama di Sekolah Model KBK, *Majalah Basis Nomor 07-08, Tahun ke-52, Juli-Agustus 2003*, hal. 31 – 43

Suparno, 2004, *Guru demokratis di era reformasi*, Yogyakarta, Kanisius

Taba, H., 1981, *Curriculum development: Theory and practice*, New York, Harcourt Brace Javanovich

Theo Riyanto, 2002, *Pembelajaran sebagai suatu bimbingan pribadi*, Jakarta, Grasindo

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional